

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar untuk menjaga kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu melakukan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar;
 - b. bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama pemerintah daerah secara terpadu untuk menjaga kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPKT; dan
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya di PPKT.

BAB II

LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengacu pada rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi KSNT yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. keterpaduan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. keterpaduan ekosistem darat dan laut;
 - c. keterpaduan sains dan manajemen;
 - d. keterpaduan antar sektor; dan
 - e. keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

- (3) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi perencanaan dan implementasi yang meliputi:
 - a. pertahanan, keamanan, dan pembinaan wilayah;
 - b. kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.
- (4) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen rencana kerja masing-masing kementerian/lembaga;
- (2) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berikutnya.
- (3) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional.
- (4) Peninjauan kembali rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian/lembaga dan

dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan.

- (5) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar penyesuaian rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- (2) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Wakil Ketua merangkap Anggota:
 1. Wakil Ketua I : Menteri Pertahanan;
 2. Wakil Ketua II : Menteri Kelautan dan Perikanan;
 3. Wakil Ketua III: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Anggota:
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Menteri Keuangan;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Menteri Perhubungan;
 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 11. Menteri Pertanian;
 12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 16. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 18. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 19. Sekretaris Kabinet;
 20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 22. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 23. Kepala Badan Informasi Geospasial;
 24. Kepala Badan Keamanan Laut;
 25. Kepala Badan Intelijen Negara;
- e. Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

- (1) Menteri/pimpinan lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana

aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal terdapat isu strategis yang menyangkut kedaulatan atau pertahanan keamanan negara di luar yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat melaksanakan program/kegiatan atau langkah-langkah yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari para pakar/ahli, kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penetapan kebijakan, rencana pengembangan, dan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar;
 - b. memberikan rekomendasi prioritas pembangunan PPKT berpenduduk berdasarkan penilaian status pengelolaannya;
 - c. mengusulkan percepatan dan integrasi pembangunan suatu lokasi/*cluster* PPKT secara terintegrasi lintas kementerian/lembaga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 - e. melakukan evaluasi rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan

- f. melakukan pembinaan dan arahan dalam pemanfaatan PPKT.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Ketua Tim Koordinasi kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Kerja I, membidangi urusan pertahanan dan keamanan diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang strategi pertahanan, Kementerian Pertahanan;
 - b. Tim Kerja II, membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana dasar, ekonomi, dan sosial budaya diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Tim Kerja III, membidangi urusan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan diketuai oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan setiap tahun terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar kepada Ketua Tim Koordinasi melalui sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pasal 12

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dan pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut	Konferensi, sidang, negosiasi, dan pembahasan kesepakatan batas wilayah negara	Terselesaikannya perjanjian batas wilayah negara di laut	Ditandatanganinya kesepakatan perjanjian batas wilayah negara						Kementerian Luar Negeri	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pembangunan Pos Pertahanan dan/atau Pos Keamanan	Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi/Renovasi, Pos Pertahanan dan Keamanan	Terbangunnya Pos Pertahanan Keamanan	Terbangunnya Pos Tentara Nasional Indonesia di PPKT sebanyak 10 (sepuluh) Unit						a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
										Nasional Indonesia	
			Terbangunnya Pos Polisi	Terbangunnya Pos Polisi di PPKT Berpenduduk sebanyak 10 (sepuluh) Unit						Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. Pemerintah Daerah
3	Penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia di PPKT (Satuan Tugas Pulau Terluar)	Terlaksananya pengamanan PPKT	Kondisi pengamanan di PPKT terpantau dan kondusif						a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut; b. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat
		Penempatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di PPKT berpenduduk	Terlaksananya keamanan PPKT berpenduduk	Kondisi keamanan dan ketertiban di PPKT berpenduduk terpantau dan kondusif						Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Dukungan logistik, peralatan, dan perlengkapan	Terlaksananya dukungan logistik, peralatan, dan perlengkapan Pos Pertahanan dan Keamanan di PPKT	Pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan, dan patroli berjalan dengan baik						Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
4	Penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara	Survei identifikasi/inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah laut	Terlaksananya survei inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah laut	Laporan hasil identifikasi titik referensi batas negara di wilayah laut di PPKT						Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Pemerintah Daerah
		Survei identifikasi/inventarisasi titik referensi batas negara di wilayah darat	Terlaksananya survei inventarisasi titik referensi batas	Laporan hasil identifikasi titik referensi batas negara di wilayah darat di PPKT						Badan Nasional Pengelola Perbatasan	a. Kementerian Pertahanan b. Pemerintah Daerah

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			negara di wilayah darat								
		Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan simbol batas negara di Titik Dasar/Titik Referensi (TD/TR)	Terlaksananya pembangunan fisik, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan simbol/ tanda batas negara	Bangunan simbol negara/tanda batas negara yang representatif						a. Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	a. Kementerian Pertahanan b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan c. Pemerintah Daerah
5	Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Survei dan perencanaan pembangunan SBNP	Terlaksananya perencanaan pembangunan SBNP	Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan SBNP						Kementerian Perhubungan	Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut Tentara Nasional

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
											Indonesia Angkatan Laut
		Pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan SBNP	Terlaksananya Pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan SBNP	Terbangunnya SBNP, berfungsi dan meningkatnya kondisi SBNP						Kementerian Perhubungan	Pusat Hidro-Oceanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
6	Pengembangan potensi maritim dan PPKT lainnya	Survei, kajian, penelitian, uji coba	Terlaksananya survei, kajian, penelitian, ujicoba	Data dan informasi atau hasil kajian/penelitian potensi maritim						a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian	a. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Pemerintah Daerah

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
										Pertahanan d. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	
		Kerja sama pengembangan/pemanfaatan potensi maritim	Terlaksananya kerja sama pengembangan potensi maritim	Adanya kerja sama pengembangan potensi maritim						a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Pertahanan d. Markas Besar Tentara	a. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Kementerian Keuangan c. Pemerintah Daerah

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
										Nasional Indonesia	
		Pelaksanaan/ implementasi/ pengembangan potensi maritim	Terlaksananya pengembangan potensi maritim	Potensi maritim yang dapat dikembangkan/ dimanfaatkan						a. Kementerian an Pertahana n b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia c. Menteri an Kelautan dan Perikanan d. Dinas Pembinaa n Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	a. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Kementerian Keuangan c. Pemerintah Daerah

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
7	Pembinaan Wilayah	Sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat sipil masyarakat	Terlaksananya sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat sipil masyarakat	Meningkatnya rasa nasionalisme nasional						a. Kementerian Dalam Negeri b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Pemerintah Daerah
		Fasilitasi PPKT untuk masuk lokasi prioritas Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Terlaksananya identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan dan pendukung kawasan lainnya	Data kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan dan pendukungnya di PPKT sebagai lokasi prioritas						Kementerian Dalam Negeri	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
8	Operasi Kontra Intelijen	Operasi kontra intelijen di PPKT	Terlaksananya operasi kontra intelijen, dialog kebangsaan, dan kegiatan pendukungnya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama,	Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat di PPKT dan terpetakannya permasalahan strategis di PPKT (batas negara, keamanan, terorisme, aktivitas						Badan Intelijen Negara	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			tokoh pemuda, guru, dan siswa.	ilegal, dan narkoba)							
9	Pembinaan Teritorial	Sosialisasi, pelatihan bela negara, dan pembinaan	Terlaksananya sosialisasi, pelatihan bela negara, dan pembinaan	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kesiapsiagaan terhadap bela negara						a. Kementerian Pertahanan b. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
		Operasi Pengamanan/ Pengawasan PPKT	Terlaksananya operasi pengamanan PPKT	PPKT aman secara fisik, aman dari pelanggaran wilayah, dan aman dari kegiatan ilegal						Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
											c. Komando Daerah Militer
10	Penyusunan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan	Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan						Kementerian Pertahanan	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Sekretariat Negara
11	Patroli Laut/Pengamanan Laut	Patroli laut gabungan dalam pengamanan dan Pemantauan PPKT	Terlaksananya patroli gabungan bersama instansi dan <i>stakeholder</i> terkait dalam pengamanan PPKT	Terpantaunya kondisi keamanan dan ketertiban di PPKT dan perairan di sekitarnya						a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Kepolisian Daerah	a. Badan Keamanan Laut b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Kelautan dan Perikanan

STRATEGI I. PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
											e. Polisi Perairan dan Udara
12	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan PPKT	Terlaksananya patroli pengawasan pengelolaan PPKT	Pengelolaan PPKT tertib, terawasi, taat, dan tingkat pelanggaran menurun.						Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Tentara Nasional Indonesia b. Kepolisian Perairan c. Pemerintah Daerah d. Badan Keamanan Laut

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pembangunan infrastruktur dasar perhubungan	Pembangunan fasilitas pelabuhan (laut)	Terbangunnya fasilitas pelabuhan umum	Tersedianya pelabuhan umum yang representatif di PPKT						Kementerian Perhubungan	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Rehabilitasi dan/atau peningkatan pelabuhan	Terlaksananya rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pelabuhan	Meningkatnya kondisi fasilitas pelabuhan yang baik						Kementerian Perhubungan	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Pengembangan Infrastruktur Kebandarudaraan	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana bandara/lapangan terbang perintis	Terlaksananya pembangunan bandara/lapangan terbang baru di PPKT	Tersedianya fasilitas bandara/ lapangan terbang baru di PPKT						Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah
			Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara	Meningkatnya kelengkapan dan kondisi fasilitas prasarana bandara di PPKT						Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah
3	Pembangunan Dermaga	Pembangunan dermaga/jetty/ tambat labuh	Terbangunnya dermaga/jetty/ tambat labuh pelabuhan rakyat	Tersedianya dermaga/jetty/ tambat labuh labuh/jetty						a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Pemerintah Daerah
4	Pembangunan aksesibilitas di kawasan	Penyediaan angkutan laut	Penyediaan kapal perintis, kapal tol	Tersedianya akses dan layanan						a. Kementerian Perhubungan	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
	perbatasan dan PPKT	perintis dan tol laut	laut, trayek, dan subsidi	transportasi laut di PPKT						b. Badan Keamanan Laut c. Badan Nasional Pengelola Perbatasan	
5	Pembangunan jalan strategis di kawasan perbatasan	Jalan Akses/ Jalan Lingkar	Terbangunnya jalan di PPKT (kelas jalan: nasional, provinsi, kabupaten, non status)	Tersedianya akses jalan di PPKT						Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
6	Penyediaan Listrik	Pembangunan Pembangkit Listrik	Terbangunnya pembangkit/ sumber listrik di PPKT	Tersedianya energi dan jaringan listrik di PPKT berpenduduk						Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Badan Usaha Milik Negara b. Perusahaan Listrik Negara
		Program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)	Terlaksananya pengadaan dan distribusi LTSHE di PPKT berpenduduk	Tersedianya lampu tenaga surya hemat energi untuk masyarakat di PPKT						Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Daerah
7	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Telekomunikasi	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan <i>Base</i>	Tersedianya jaringan telekomunikasi di PPKT berpenduduk	Tersedianya infrastruktur telekomunikasi internet di PPKT						Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Badan Usaha Milik Negara b. Telkomsel

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		<i>Transceiver Station</i> (BTS)									
		Penyediaan akses/ jaringan internet	Terlaksananya perpanjangan ketersediaan akses internet	Tersedianya akses internet untuk sektor esensial (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan pertahanan keamanan)						a. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) b. Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemerintah Daerah
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan permukiman, drainase	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin						Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah
		Penyediaan air bersih	Terlaksananya penyediaan air bersih di PPKT berpenduduk	Tersedianya air bersih, dan sumber air baku, pipanisasi, atau penampungan						a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
9	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	Pembangunan SPBUN, Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	Tersedianya BBM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	BBM tersedia cukup sepanjang tahun dan harga standar						Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Badan Usaha Milik Negara b. Pertamina
		Pemberian rekomendasi pembangunan SPBUN	Tersedianya rekomendasi pembangunan SPBUN	Terpenuhinya Rekomendasi pembangunan SPBUN						Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Pertamina c. PT. Aneka Kimia Raya
		Pembangunan SPDN	Memfasilitasi kebutuhan BBM solar nelayan	Tersedianya BBM solar untuk nelayan						Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Pertamina c. PT. Aneka Kimia Raya
		Pembangunan Pasar	Meningkatnya perdagangan dan pemasaran produk	Tersedianya pasar rakyat/pasar desa/pasar kecamatan						Kementerian Perdagangan	

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Gudang Sembako	Meningkatkan ketahanan pangan dan antisipasi saat paceklik/ musim gelombang	Tersedianya cadangan bahan pokok yang cukup dan ketahanan pangan						Kementerian Sosial	
10	Pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Bantuan Kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana nelayan	Terdistribusikannya bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Bimbingan teknis dan pelatihan perikanan tangkap	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan perikanan tangkap	Meningkatnya keterampilan SDM nelayan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Pulau Sebatik	Terlaksananya pembangunan SKPT di Pulau Sebatik	SKPT berjalan optimal dengan sarana dan prasarana yang lengkap						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pembangunan SKPT	Terlaksananya pembangunan SKPT	SKPT berjalan optimal, sarana dan prasarana lengkap						Kementerian Kelautan dan Perikanan	

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Terbangunnya pelabuhan perikanan	Pelabuhan perikanan yang fungsional						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Perikanan Budidaya, KJA, tambak, dan pembenihan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan	Meningkatnya produktivitas pembudi daya ikan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Badan Usaha Milik Negara
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Penyediaan akses pembiayaan dan permodalan	Tersedianya akses pembiayaan dan permodalan	Meningkatnya pembiayaan dan permodalan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Badan Usaha Milik Negara
11	Pengembangan sarana dan prasarana daerah tertentu	Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana di PPKT	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya laut, tambak garam, dan wisata bahari						Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Pulau Kecil dan terluar									
12	Pengembangan pengelolaan ruang laut	Perencanaan ruang laut	Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT	Materi teknis Rencana Zonasi KSNT PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Konservasi dan keanekaragaman hayati laut	Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan	Meningkatnya kesejahteraan kelompok pegiat konservasi						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Pengembangan jasa kelautan	Desa wisata bahari	Terbentuknya desa wisata bahari						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Bantuan sarana dermaga apung	Tersedianya dermaga apung						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
			Bantuan sarana ekonomi produktif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT)/ Hak Pengelolaan	Penerbitan sertifikat HAT atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan						Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Pemerintah Daerah
			Fasilitasi perizinan berusaha terkait pemanfaatan PPKT	Penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
			Fasilitasi wilayah dan kelembagaan masyarakat hukum adat	Penetapan wilayah dan kelembagaan masyarakat hukum adat						Pemerintah Daerah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional						Pemerintah Daerah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13	Penguatan sistem perkarantinaan ikan, jaminan	Operasi bersama dengan instansi terkait dalam	Terlaksananya pengawasan terpadu di PPKT	Meningkatnya pengawasan dan/atau						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
	mutu, dan keamanan hasil perikanan	rangka pengawasan lalu lintas media pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hasil perikanan		menurunnya pelanggaran							
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan di PPKT	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penyadartahuan tentang aturan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Terlaksananya sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Meningkatnya pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
14	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang penangkapan ikan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang penangkapan ikan di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam penangkapan ikan di PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang pengolahan hasil perikanan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat pengolah hasil perikanan di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan di PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Bimbingan teknis peningkatan keterampilan masyarakat bidang pembuatan pakan buatan di PPKT	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat pembudi daya ikan di PPKT	Meningkatnya keterampilan dalam pembuatan pakan ikan di PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	
		Penyuluhan kepada pelaku usaha bidang	Terlaksananya penyuluhan untuk pelaku	Meningkatnya pengetahuan dan						Kementerian Kelautan dan Perikanan	

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		kelautan dan perikanan di PPKT	usaha bidang kelautan dan perikanan	pemahaman pelaku usaha							
15	Industri jasa maritim	Kawasan industri, docking, perkapalan, dan wisata bahari	Terlaksananya pembangunan industri jasa maritim di PPKT	Terciptanya kawasan industri jasa maritim di PPKT						a. Kementerian Perindustrian b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
16	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan, peningkatan, renovasi fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, dan Klinik)	Terlaksananya pembangunan, peningkatan, dan renovasi fasilitas kesehatan di PPKT	Tersedianya fasilitas kesehatan yang representatif						Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah
17	Peningkatan SDM pelayanan kesehatan	Penyediaan dan peningkatan SDM dokter, tenaga medis, dan paramedis	Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM tenaga kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu						Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bergerak atau (FHC) di PPKT berpenduduk	Terlaksananya pelayanan kesehatan (Yankes) bergerak sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.	Tersedianya pelayanan kesehatan (Yankes) dasar, rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak, dan farmasi.						Kementerian Kesehatan	a. Pemerintah Daerah b. Pusat Kesehatan Masyarakat
19	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Pelayanan KB, Pelayanan KB Bergerak (<i>mobile</i>), Sosialisasi, Konseling, dan Pembinaan Kelompok	Terlaksananya kegiatan pelayanan KB, sosialisasi, konseling dan pembinaan keluarga berencana.	Meningkatnya peserta KB, pemahaman kesehatan reproduksi, kualitas keluarga di PPKT, menurunnya angka stunting (gizi buruk)						a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional b. Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah
20	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	Pembangunan sarana Pendidikan Dasar (Taman Kanak-kanak, Pendidikan Anak	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan dasar di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan dasar yang berkualitas dan mencukupi						Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Usia Dini, dan Sekolah Dasar)									
		Pembangunan Sarana Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan)	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan menengah di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan menengah yang berkualitas dan mencukupi						Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah
		Pembangunan Sarana Pendidikan Tinggi (Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi)	Terlaksananya pembangunan sarana pendidikan tinggi di PPKT	Tersedianya sarana pendidikan tinggi yang representatif						Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah
		Pelatihan dan bimbingan teknis masyarakat di PPKT	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis di PPKT	Meningkatnya keterampilan masyarakat PPKT						Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Penyediaan SDM Tenaga Pendidik, Guru	Terlaksananya rekrutmen guru dari SDM lokal	Terpenuhinya kebutuhan guru sekolah di PPKT						Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah
21	Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Pengembangan pertanian berbasis keunggulan lokal	Berkembangnya kegiatan pertanian di PPKT	Meningkatnya produksi pertanian dan ketahanan pangan						Kementerian Pertanian	
		Pengembangan peternakan berbasis keunggulan lokal	Berkembangnya kegiatan peternakan di PPKT	Meningkatnya produksi ternak dan ketahanan protein						Kementerian Pertanian	
		Pengembangan perkebunan berbasis keunggulan lokal	Berkembangnya kegiatan perkebunan di PPKT	Tumbuhnya komoditi perkebunan yang potensial						Kementerian Pertanian	
22	Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa	Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh						a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
										Tertinggal, dan Transmigrasi	
		Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya program pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa yang tangguh						a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah
23	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata bahari	Terlaksananya pengembangan destinasi & atraksi wisata bahari	Tumbuh dan berkembangnya destinasi wisata bahari di PPKT						Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah
		Pengembangan ekonomi kreatif	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif	Tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat						Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerintah Daerah
24	Kelembagaan sosial, adat, dan budaya	Penguatan kelembagaan	Fasilitasi penguatan masyarakat adat	Kelembagaan masyarakat sosial, adat, dan budaya						a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	Pemerintah Daerah

STRATEGI II. INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		sosial, adat, dan budaya	dan kelembagaan sosial, adat, dan budaya	yang kuat dan legal/diakui						Riset, dan Teknologi b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Sosial	
25	Penataan dan penertiban pertanahan di Pulau-pulau Kecil	Updating Data Pertanahan (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan) Kawasan Perbatasan	Terlaksananya penataan, penertiban, dan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT						a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional b. Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
26	Program kesejahteraan masyarakat lainnya	Bantuan ekonomi produktif	Terpenuhinya kebutuhan sarana ekonomi masyarakat PPKT	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif dan kesejahteraan						a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pengelolaan sumber daya alam	Penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Tersusunnya rancangan peraturan, NSPK pengelolaan sumber daya alam di PPKT	Tersusunnya kebijakan, rancangan peraturan perundang-undangan, NSPK pengelolaan sumber daya alam di PPKT						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Kementerian Sekretariat Negara d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Sekretariat Kabinet

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
2	Pengelolaan kawasan hutan	a. Perencanaan pengelolaan hutan b. Pemantapan kawasan hutan c. Pembangunan Infrastruktur d. Pemanfaatan Hutan e. Pengawasan Hutan	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pemantapan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan hutan	a. Patroli rutin pengamanan kawasan b. Sosialisasi peraturan tumbuhan dan satwa liar c. Pemulihan ekosistem d. Pemadalam dini kebakaran;						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
3	Pengelolaan kawasan konservasi di PPKT	a. Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi b. Pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi c. Pembangunan infrastruktur konservasi d. Penguatan SDM pengelola konservasi	Terlaksananya kegiatan pencadangan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, pembangunan, dan penguatan SDM pengelola Konservasi di PPKT	Meningkatnya luasan konservasi dan kualitas/status pengelolaan yang efektif.						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
4	Rehabilitasi dan peningkatan lingkungan	Restorasi ekosistem pesisir dan laut PPKT	Terlaksananya kegiatan restorasi ekosistem pesisir dan laut	Melambatnya laju kerusakan dan pulihnya ekosistem PPKT						Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
											c. Pemerintah Daerah
		Penanaman mangrove dan vegetasi pantai	Terlaksananya rehabilitasi pantai dan ekosistem mangrove	Meningkatnya luasan mangrove dan vegetasi pantai						Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Pemerintah Daerah
		Rehabilitasi terumbu karang	Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang	Meningkatnya kondisi dan luasan terumbu karang						Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Pemerintah Daerah
5	Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pengembangan mitigasi bencana	Terlaksananya mitigasi bencana di PPKT	Meningkatnya kesadaran dan/atau menurunnya tingkat risiko bencana						a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pemerintah Daerah
		Pengembangan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya kegiatan adaptasi	Meningkatnya ketahanan/resiliensi masyarakat pesisir						a. Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			perubahan iklim							b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
6	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai perbatasan negara	Pembangunan <i>breakwater/ seawall</i> , tanggul, dan struktur hybrid	Menurunnya laju abrasi dan kerusakan pesisir/ pantai di PPKT	Terbangunnya infrastruktur pengaman pantai dari abrasi						Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
7	Pengelolaan sampah dan <i>Marine Debris</i>	Penanganan pencemaran	Berkurangnya risiko dampak pencemaran	Tertanganinya zat/ bahan pencemaran dan karbon						a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Penanganan sampah, sampah plastik / <i>marine debris</i>	Meningkatnya lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat	Berkurangnya sampah plastik dan meningkatnya kesadaran kolektif						a. Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah
8	Sanitasi lingkungan dan drainase	Pembangunan drainase	Meningkatnya kondisi	Tersedianya drainase yang berfungsi baik						a. Kementerian Pekerjaan Umum dan	Pemerintah Daerah

STRATEGI III. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM											
No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Lokasi (Pulau) dan Waktu					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			lingkungan permukiman							Perumahan Rakyat b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Pembangunan sanitasi lingkungan	Meningkatnya kondisi sanitasi lingkungan	Terciptanya sanitasi lingkungan yang baik						Kementerian Kesehatan	a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Pemerintah Daerah
9	Penguatan kelembagaan masyarakat	Pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terlaksananya pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang mandiri dan efektif						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah
		Bantuan sarana dan prasarana pengawasan	Tersedianya bantuan sarana dan prasarana pengawasan	Meningkatnya peran dan fungsi Pokmaswas						Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT